

TESIS

**PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP HAK MEWARIS ANAK**



OLEH:

NABILA AISHA PADMASARI, S.H.

NIM. 032014253031

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

TESIS
PEMBATALAN ATA KELAHIRAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP HAK MEWARIS ANAK

TESIS

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Oleh:
NABILA AISHA PADMASARI, S.H.
NIM. 032014253031

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 11 Januari 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 197111131997022001

Dosen Pembimbing Kedua :



Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada Hari/Tanggal Selasa, 11 Januari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS :

**Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001**

**Anggota : 1. Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H.
NIP. 196806031993032001
2. Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 197111131997022001
3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H
NIP. 198003202005012002
4. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Aisha Padmasari, S.H.

NIM : 032014253031

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 21 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Nabila Aisha Padmasari, S.H.

NIM. 032014253031

ABSTRAK

Akta Kelahiran merupakan sebuah bukti yang memuat identitas setiap anak serta sebagai penjamin pelaksanaan hak-hak bagi seorang anak yang diberikan oleh Negara. Akta kelahiran juga merupakan bukti otentik mengenai asal-usul seorang anak dan sebagai dasar timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Hak yang timbul dari adanya akta kelahiran salah satunya adalah hak waris. Pembuatan akta kelahiran yang terdapat ketidaksesuaian antara informasi didalam akta dengan fakta yang ada akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari serta menyebabkan akta kelahiran menjadi cacat substansi. Akta kelahiran yang didalamnya terdapat cacat substansi dapat diajukan pembatalan. Pembatalan akta kelahiran memberi akibat terhadap hak mewaris anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Tesis ini membahas mengenai pembatalan dari akta kelahiran yang didalamnya terdapat cacat substansi. Selain itu, di dalam penulisan tesis ini juga membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap hak mewaris anak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akta kelahiran yang terdapat cacat substansi dapat dibatalkan melalui Pengadilan atau tanpa melalui Pengadilan. Selain itu, Pembatalan akta kelahiran mengakibatkan anak kehilangan hak mewaris karena musnahnya hubungan hukum orang tua dan anak sebagaimana yang tercantum di dalam akta kelahiran. Oleh sebab itu diharapkan adanya keterlibatan Pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan penyuluhan terkait dengan akibat dari pembuatan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya.

Kata Kunci : Akta Kelahiran, Pembatalan Akta Kelahiran, Hak Waris Anak

ABSTRACT

A birth certificate is a proof that contains the identity of each child, as well as a guarantor for the fulfillment of a child's rights by the State. This certificate also serves as an authentic evidence of a child's origins and acts as the basis for the legal relationship between parents and a child, giving rise to rights and obligations for both parties. One of these rights that arises from the existence of a birth certificate is inheritance rights. Any discrepancy existing between the information in the certificate and the actual facts will lead to future problems or disputes, rendering the birth certificate defective. A birth certificate in which there is a substance defect can be subjected for cancellation. Such cancellation of birth certificate has an impact on the inheritance rights. This normative legal research implemented statute approach, conceptual approach, and case approach. This research discussed the cancellation of a birth certificate in which there is a substance defect. In addition, the legal consequences of canceling birth certificate on a child's inheritance rights are also discussed. The research results revealed that a birth certificate containing substance defects can be subjected to cancelation through the Court or without the Court. In addition, the cancellation causes the child to lose inheritance rights due to the destruction of the legal relationship between the parents and the child as stated in the birth certificate. Therefore, it is advised that the Government or the Department of Population and Civil Registry to provide counseling related to the consequences of creating birth certificates that are not in accordance with the legal facts.

Keywords: Birth Certificate, Cancellation of Birth Certificate, Child's Inheritance Rights

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. dan Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. selaku koordinator dan sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan;
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H dan Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku tim pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis;
5. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.dan Dr. Sri Winarsih, S.H, M.H. selaku anggota tim penguji tesis.
6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan kepada saya untuk menyumbangkan ilmunya sealama berjalannya kesempatan kuliah, dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi tepat waktu;
7. Dewan Penguji Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Tesis saya ini;

8. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Fakultas Hukum Magister Kenotariatan yang turut membantu penulis dalam hal urusan administrasi selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua Penulis Ir. Nurhadi Pudjo Padmono dan Waode Tursini Asrie, S.Psi atas perhatian, dukungan yang diberikan dan tentunya biaya untuk saya kuliah;
10. Segenap keluarga lainnya yang ikut memberikan doa dan restunya selama kuliah;
11. Teman-teman Hip Hura (Abdi, Viratung, Galuh, Rania, Sayyid, Rudi, Mirza, Arina, Gisca, Raras, Aya, Helvy, Fayed, Febrianisa, Fitata, Gitaayu, Nafida, Cintantya, Amelia, Fahmi, Avel, Arbi, Hamna, Mosqa) yang selalu dan selalu mendorong saya untuk memulai dan menyelesaikan tesis ini;
12. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2020, yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;
13. Rekan-rekan, siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Surabaya, 19 Januari 2022

Penyusun

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun Nomor 292)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102)

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan
Sipil

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
(Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Mjl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Tipe Penelitian	13
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	14
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	14
1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	16
BAB II PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN YANG	
 DIDALAMNYA TERDAPAT CACAT SUBSTANSI	18
2.1 Keabsahan Akta Kelahiran	18
2.2 Kewenangan Pejabat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran	34

2.2.1 Syarat Penerbitan Akta Kelahiran	34
2.2.2 Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran	35
2.3 Akibat Hukum Akta Kelahiran Yang Terdapat Cacat Substansi	36
2.4 Pembatalan Akta Kelahiran Yang Terdapat Cacat Substansi	40
BAB III AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN	
TERHADAP HAK MEWARIS ANAK	44
3.1 Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran	44
3.2 Hukum Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i>	45
3.3 Hak Waris Anak Yang Akta Kelahirannya Dibatalkan	50
3.4 Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Terkait Dengan Pembatalan Akta Kelahiran	50
3.4.1 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Sby	50
3.4.2 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN.Mjl	57
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR BACAAN	
DAFTAR LAMPIRAN	